

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Hasil Penelitian

Untuk menganalisis data dalam rangka menjawab permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Di mana bertujuan mendeskripsikan kejadian atau fakta, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi. Analisis ini dilakukan berdasarkan pengamatan dilapangan, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. harus dikumpulkan kemudian dikaji sesuai teori lalu diinterpretasikan. Dalam hal ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang sumber penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa Benlutu.

5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Analisis sumber penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana Desa Benlutu Kecamatan Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sumber penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Penerimaan Desa terdiri atas (1) pendapatan asli Desa (PADes) yang meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. (2) pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa, Bagian

dari hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. (3) pendapatan lain-lain yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sumber penerimaan Desa Benlutu sama seperti desa-desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia namun Desa Benlutu tidak mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) sebagai pemasukan desa. Desa Benlutu tidak mempunyai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang mampu mendorong perekonomian desa. Aset-aset desa seperti tanah milik desa, kebun dan aset lain desa yang dapat dikelola untuk menghasilkan pemasukan tambahan bagi desa disebut sebagai lahan tidur seluas 4 Ha.

Adapun pendapatan transfer dari daerah tingkat dua yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong kecil, terhitung Rp. 9.000.000 pertahunnya. Pendapatan transfer dari daerah tingkat satu yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau bantuan keuangan provinsi pun tiap tahunnya hanya mentransfer Rp.2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikondisikan Pemerintah Desa Benlutu sebagai dana operasional aparat pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami peningkatan setiap tahun yaitu pada tahun 2014 ADD Desa Benlutu sebesar Rp. 183.346.469, terus bertambah ditahun 2015 pada angka Rp.269,4 juta dan 2016 ADD Desa Benlutu bertambah lagi menjadi Rp. 289,7 juta. Dana Desa (DD) juga demikian, Kementerian Percepatan Pembangunan Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi pun merealisasi

Rp. 75.800.000 di tahun 2014, Rp. 276.598.777 di tahun 2015 dan di tahun 2016 realisasi dana desa mencapai Rp. 620, 3 juta.

Di bidang sumber penerimaan lainnya, Pemerintah Desa Benlutu mendapatkan Hibah dari Balai Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.1.100.000.000. Terhitung 3 (tiga) tahun anggaran, total penerimaan terbesar Desa Benlutu pada tahun anggaran 2015 yaitu Rp. 1.657.362.155. Penjabaran Penerimaan 3 tahun anggaran (2014, 2015, dan 2016) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Penerimaan Desa Benlutu 3 (tiga)
Tahun Anggaran 2014-2016

No	Uraian	Tahun dan penerimaan			Keterangan
		2014	2015	2016	
I	PADes	-	-	-	
	1. Hasil Usaha	-	-	-	
	2. Hasil Aset	-	-	-	
	3. Swadaya	-	-	-	
	4. Partisipasi, Gotong Royong dan Pendapatan lain Desa yang Sah	-	-	-	
II	Pendapatan Transfer				
	1. Dana Desa	75.800.000	276.598.777	620.348.000	Kementerian percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi
	2. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	9.000.000	9.022.242	9.441.000	10% Hasil pajak dan retribusi daerah Kab. TTS
	3. Alokasi Dana Desa	183.346.469	269.491.136	289.754.000	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	4. Bantuan Keuangan Provinsi	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
III	Pendapatan lain – lain				
	1. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga		1.100.000.000		
TOTAL PENERIMAAN		270.396.469	1.657.362.155	921.793.000	

Sumber: Data diolah Tahun 2017

5.2.2 Pengelolaan Sumber Penerimaan Desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana Desa Benlutu Kecamatan Batuputih

Pengelolaan sumber penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Benlutu Kecamatan Batuputih merupakan proses pengendalian, pengaturan mengurus, menyelenggarakan anggaran penerimaan desa untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Benlutu agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku.

1. Tahap perencanaan pengelolaan sumber penerimaan desa

Tahap perencanaan pengelolaan sumber penerimaan Desa di Desa Benlutu Kecamatan Batuputih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana penerimaan desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari kepala desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat

desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi hasil informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Benlutu Kecamatan Batuputih masih sebatas memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Benlutu yaitu Bapak Obed Fallo, S.Sos mengenai tahapan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang. Beliau mengatakan bahwa dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.”(wawancara 18 September 2017).

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan

prasarana Desa Benlutu yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana Desa Benlutu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Benlutu, yaitu bapak Jhoni M.Woen yang mengatakan bahwa kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan pembuatan pasar dan pengerasan jalan dan pembangunan yang lain”(Wawancara tanggal 18 September 2017).

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, DURK tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan ketua LPM Desa Benlutu yaitu bapak Anderias Babu yang mengatakan bahwa:

“Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Benlutu ini memang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan penonton yang

menyaksikan setiap kegiatan yang terjadi di desa” (*wawancara 19 September 2017*).

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Obed Fallo, S.Sos selaku Kepala Desa, Johny M. Woen selaku ketua BPD, dan Anderias Babu selaku ketua LPM Desa Benlutu. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan tidak adanya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Seluruh penerimaan Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Benlutu.

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan penerimaan Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta tidak adanya transparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Di Desa Benlutu Kecamatan Batuputih masih kurang baik.

2. Tahapan pelaksanaan penerimaan desa

Pelaksanaan pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Benlutu dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016 lebih banyak bersumber dari pendapatan

transfer yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Penerimaan Desa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun terkait penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa di Desa Benlutu dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Data Pembangunan T.A 2014-2016

Tabel 5.2 menunjukan bahwa jumlah penerimaan desa yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa Benlutu dalam tiga tahun terakhir (2014,2015,2016) adalah sebesar Rp. 1.967.414.157 di mana anggaran tersebut dialokasikan ke jenis kegiatan pembangunan, yakni pada tahun 2014 dilakukan renovasi ruang kelas di SD inpres oelnunuh Desa Benlutu dengan anggaran sebesar Rp. 97.639.000 dan pengadaan bibit sayur-sayuran yang menggunakan dana dari ADD sebesar Rp. 5.730.000. pada tahun 2015 pemerintah Desa Benlutu melaksanakan peningkatan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana diantaranya pembangunan cekdam sebesar Rp. 1.000.000.000, embung sebesar Rp. 100.000.000, bantuan bahan non lokal bagi masyarakat yang diambil dari Dana Desa sebesar Rp. 143.552.920, pemeliharaan jalan desa / sirtu sebesar Rp. 90.381.849, pembuatan cekdam/embung sebesar Rp. 92. 710. 388, bantuan semen bagi garaja tubnua sebesar Rp. 1.975.000, pengadaan viberglass bagi 2 SD dan 1 SMA sebesar Rp. 10.500.000 dan pengadaan seng bagi 7 kk sebesar Rp. 12.775.000. dan pada tahun 2016 dibangunnya pekerjaan jalan baru sebesar Rp. 125.350.000, peningkatan jalan sirtu sebesar Rp. 146.500.000 bak penampung sebesar Rp. 41.000.000, selang plastic/pipa PE sebesar Rp. 20.000.000 dan pembangunan pasar hewan sebesar Rp. 79.300.000.

Jika dilihat dari besarnya sumber dana, maka konsentrasi pembangunan sarana dan prasarana di Desa Benlutu terjadi pada tahun

2015 yang menggunakan dana sebesar Rp. 1.451.895.157. hal ini dikarenakan pembuatan satu unit embung yang memakan dana sebesar 1 miliar rupiah dan bersumber dari balai sungai dan dinas pertanian. Maka secara kuantitas, pada tahun 2014 pemerintah Desa Benlutu hanya melakukan 2 kegiatan pembangunan saja sehingga tahap pengelolaan penerimaan desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Informasi yang diperoleh dari informan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Benlutu yaitu Bapak Obed Fallo, S.Sos yang mengatakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangankan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah (wawancara 18 September 2017).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Hal ini seperti pernyataan

salah satu anggota masyarakat , yaitu Bapak Titus yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa (wawancara 19 September 2017).

Dengan demikian tahapan pelaksanaan pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Benlutu berjalan dengan baik,akan tetapi proses pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun tidak digunakan oleh masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pasar hewan yang dibangun oleh Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak pernah digunakan. Bukti fisik terlampir:

Foto 5.1 pasar hewan di Desa Benlutu



Adapun pembangunan irigasi yang anggarannya bersumber dari Balai Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat dikatakan tidak tepat sasaran. Pembangunan irigasi sepanjang 360 meter tidak digunakan lagi dikarenakan masyarakat tidak lagi bertani sebab rusaknya bendungan. Foto terlampir :

Foto 5.2 irigasi pertanian



Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap

pelaksanaan pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Benlutu dapat dikatakan kurang efektif.

3. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan perencanaan

Tahap penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Benlutu, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, di mana penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) tidak disusun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggungjawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Benlutu.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendehara Desa Benlutu yaitu BapakMusa Faot yang mengatakan bahwa kualitas SDM pemerintah Desa Benlutu ini memang masih tergolong sangat rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran penerimaan desa sebanyak ini dan yang menjadi penghambat kami sebagai pemerintah desa juga data yang kami miliki tidak tersimpan sehingga kami kesulitan dalam mengelola anggaran tersebut dan juga kami sangat tidak memahami dalam pengoperasian komputer. (wawancara 19 September 2017)

Pernyataan diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Ibu Dina S.Y.Bana selaku Sekretaris Desa Benlutu yang mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Benlutu memang belum disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa, dikarenakan kualitas sumber daya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Benlutu ini. (wawancara 19 september 2017).

Dalam tahapan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Benlutu, hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertanggungjawaban yang kurang efektif, di mana penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemerintah Desa Benlutu dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Benlutu. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Benlutu dapat dikatakan kurang efektif.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Iven Abi yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Benlutu tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Benlutu ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak. (wawancara 20 September 2017).

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan diatas, maka walaupun secara administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Benlutu dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama Desa Benlutu namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Benlutu dapat dikatakan kurang efektif.

5.3 Pembahasan

Analisis pengelolaan Sumber Penerimaan Desa Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Desa Benlutu

Terkait proses pengelolaan sumber penerimaan desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Benlutu Kecamatan batuputih, pemerintah Desa Benlutu terlebih dahulu menyusun tim pelaksana penerimaan desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekertaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan Selaku Bendeharan Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya proses pengelolaan penerimaan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan Perencanaan Pengelolaan Penerimaan Desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Benlutu kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran penerimaan serta bagaimana proses pengelolaan penerimaan, dimana dalam tahap perencanaan ini diukur

dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu tahap perencanaan penerimaan desa menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses pengelolaan penerimaan desa, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini, kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan penerimaan desa.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan penerimaan di Desa Benlutu hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan penerimaan di Desa Benlutu ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan tiga tahun terakhir dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi. terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Penerimaan Desa yang dilakukan di Desa Benlutu belum efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan pengelolaan penerimaan desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Benlutu berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembangunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan Desa di Desa Benlutu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak disusun oleh pemerintah Desa Benlutu dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Benlutu. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Benlutu dapat dikatakan kurang efektif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengelolaan Penerimaan Desa Di Desa Benlutu belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat terutama BPD sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan Penerimaan Desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan Penerimaan Desa yang sekaligus menjadi semangat Undang-Undang Desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

